

SKRIPSI

**PENGAWASAN KEGIATAN REKLAMASI TERHADAP
PERTAMBANGAN BATU KAPUR PT SEMEN PADANG**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

ALIF RAHMAN AULIA
2110113037

Program Kekhususan: Hukum Agraria Dan Sumber Daya Alam (PK VIII)



Pembimbing:

Dr. Syofiarti, S.H., M.Hum.
Sucy Delyarahmi, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

No.Reg : 19/PK-VIII/IV/2025

PENGAWASAN KEGIATAN REKLAMASI TERHADAP PERTAMBANGAN BATU KAPUR PT SEMEN PADANG

(Alif Rahman Aulia, 2110113037, Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 73 halaman, 2025)

ABSTRAK

Kegiatan reklamasi merupakan suatu kewajiban bagi pemegang IUP agar dapat terjaganya keberlanjutan lingkungan dan memulihkan kembali wilayah yang terdampak. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan kegiatan reklamasi oleh pemegang IUP kerap tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh sebab itu, pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan reklamasi merupakan hal yang penting guna menjamin pelaksanaan kegiatan reklamasi, yang dalam hal ini pemerintah diberi kewenangan penuh untuk membina dan mengawasi kegiatan pertambangan yang dilakukan dalam hal ini pengawasan terhadap kegiatan pertambangan dilakukan oleh Inspektur Tambang. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana pelaksanaan reklamasi oleh PT Semen Padang; (2) bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Inspektur Tambang dalam menjamin berjalannya kegiatan reklamasi batu kapur oleh PT Semen Padang; dan (3) bagaimana tindak lanjut dari pengawasan oleh Inspektur Tambang terhadap pelaksanaan reklamasi batu kapur pada PT Semen Padang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dan pendekatan kualitatif, melalui studi lapangan berupa wawancara semi terstruktur serta studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT Semen Padang telah melaksanakan reklamasi dengan metode revegetasi dan reklamasi bentuk lain pada lahan bekas tambang batu kapur. Namun, dalam penilaian keberhasilan terhadap kegiatan reklamasi tersebut dinilai masih belum memenuhi standar, penilaian terhadap kegiatan reklamasi tersebut tidak dipublikasikan oleh Inspektur Tambang dengan alasan privasi perusahaan. Dan kemudian dalam penelitian ini juga terdapat permasalahan yang dialami oleh Inspektur Tambang dalam mengawasi kegiatan reklamasi terkait ketidaksesuaian antara perencanaan awal dengan realita di lapangan. Selain itu, berdasarkan permasalahan yang dialami oleh Inspektur Tambang, pemegang IUP dapat dibebankan sanksi apabila adanya suatu penyimpangan dalam menjalankan kewajiban pelaksanaan kegiatan reklamasi. Penelitian ini berkesimpulan bahwa pengaturan terkait pelaksanaan dan pengawasan kegiatan reklamasi dalam suatu kegiatan pertambangan sudah sangat jelas diatur dalam peraturan yang berlaku, akan tetapi didalam upaya implementasinya dirasa masih kurang maksimal khususnya dalam pelaksanaan serta pengawasan terhadap kegiatan reklamasi. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan serta mengawasi kegiatan reklamasi yang dilakukan oleh pemerintah dan pelaku usaha agar tidak timbul dampak negatif yang lebih besar bagi kedua belah pihak.

Kata Kunci: Pengawasan, Reklamasi, Pertambangan.